



**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KABUPATEN JEMBER
PERIODE 1990-2014**

SKRIPSI

Oleh

**Yufika Furi Larassita
NIM 110810101055**

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KABUPATEN JEMBER
PERIODE 1990-2014**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Yufika Furi Larassita
NIM 110810101055**

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa syukur kuhaturkan kepada

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

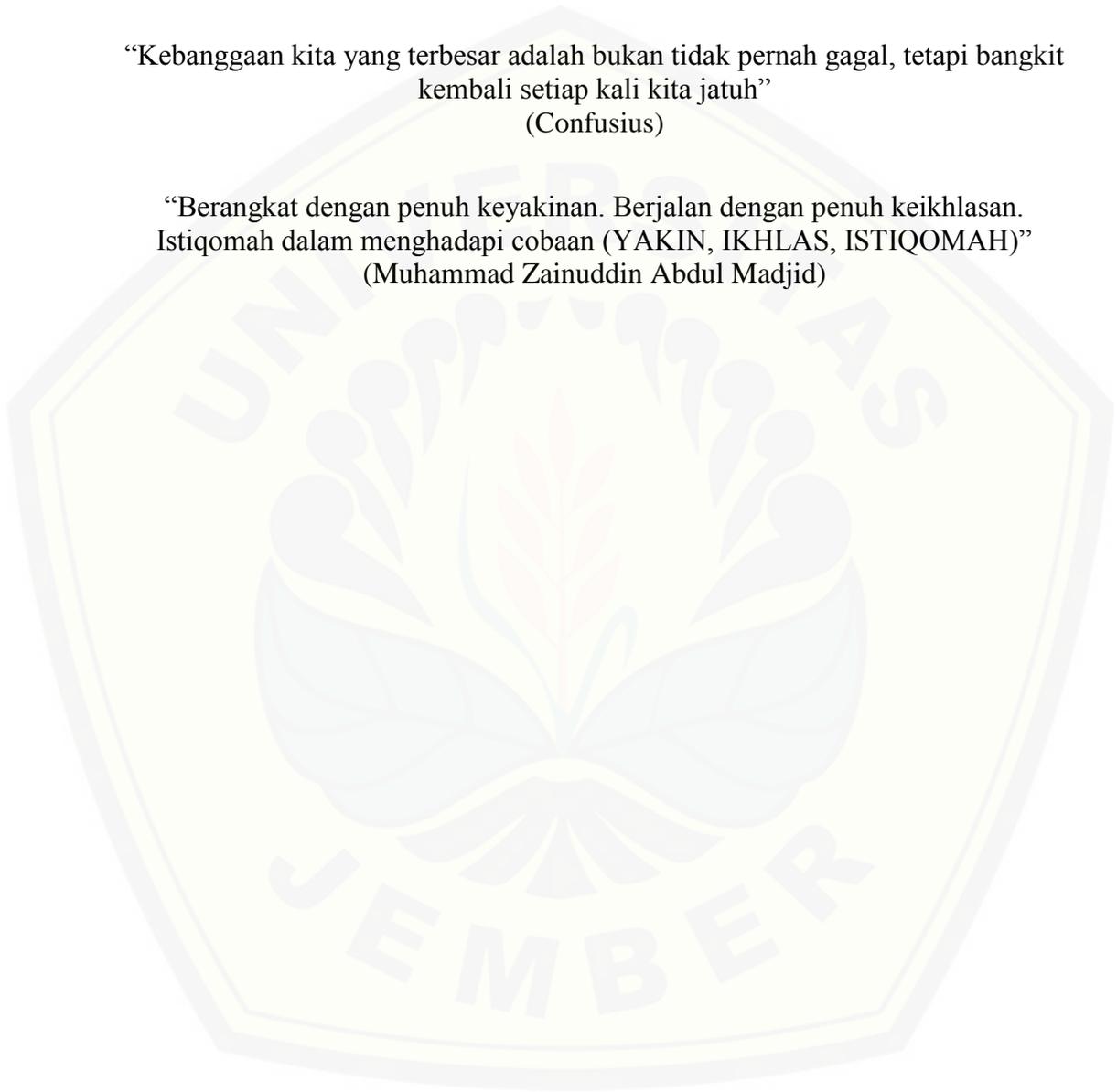
1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Rahmadi Chomsidarto dan Ibunda Mukhlasoh tercinta yang telah memberikan kasih sayang, ketulusan, cinta, motivasi serta do'a yang tiada pernah putus diberikan kepadaku.
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, sebagai keluarga kedua yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi.
4. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi UNIVERSITAS JEMBER

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”
(Q.S Al Insyirah : 6-8)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”
(Confusius)

“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan (YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH)”
(Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yufika Furi Larassita

NIM : 110810101051

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Judul Skripsi : Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten
Jember

Periode 1990 - 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenarnya.

Jember, Februari 2016

Yang menyatakan

Yufika Furi Larassita
NIM 110810101055

SKRIPSI

**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
KABUPATEN JEMBER
PERIODE 1990-2014**

Oleh
Yufika Furi Larassita
NIM 110810101055

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Aisah Jumiati S.E., M.P.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di
Kabupaten Jember Periode 1990 – 2014

Nama Mahasiswa : Yufika Furi Larassita

NIM : 110810101055

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

NIP. 19610121 1987022 002

Aisah Jumiati, S.E., M.P.

NIP.19680926 1994032 002

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes

NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN
Judul Skripsi

**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KABUPATEN JEMBER
PERIODE 1990-2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yufika Furi Larassita

NIM : 110810101055

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : **Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si** :.....
NIP. 19710610 2001122 002

Sekretaris : **Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.Si** :.....
NIP. 19780616 2003122 001

Anggota : **Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si** :.....
NIP. 19690718 1995122 001

Foto 4 x 6
warna

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

“Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990-2014”

Yufika Furi Larassita

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas
Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Penelitian ini bersifat *explanatory* yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi anggaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan dengan unit analisis realisasi anggaran pemerintah di Kabupaten Jember pada periode 1990-2014, dengan metode analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Secara keseluruhan model regresi linear berganda yang digunakan menerangkan pengaruh realisasi anggaran pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Hal ini menjelaskan bahwa realisasi anggaran pemerintah cenderung meningkat setiap tahunnya bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Anggaran pendapatan dan belanja daerah, indeks pembangunan manusia

“The Effect of Local Budget (APBD) Through Human Development Index in Jember District in The Period of 1990-2014”

Yufika Furi Larassita

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

This research has as purpose to determine the influence of government expenditure on education, health and infrastructure to improving the human development index in Jember. This study is exsplanatory that has as purpose to analyze the effect of the realization of the government budget on education, health and infrastructure to human development index in Jember. This research was conducted by the unit of analysis realization in Jember district government budget in the period 1990-2014, with the method of data analysis using multiple linear regression. The result of this research indicates that the variable realization of the government budget on education, health and infrastructure has effect positive and significant impact on the human development index in Jember. Overall, linear regression models were used to explain the effect of the realization of the government budget to improve the human development index in Jember. It is clear that the realization of the government budget is likely to increase every year that has as purpose to improve the human development index in Jember.

Keywords : *Local Budget, Human Development Index*

RINGKASAN

PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN JEMBER PERIODE 1990-2014; Yufika Furi Larassita; 110810101055; 2016: 90 Halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990-2014”. Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu realisasi APBD di bidang pendidikan, realisasi APBD di bidang kesehatan, realisasi APBD di bidang infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Pengukuran APBD tahun 1990 sampai 2014, ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat membandingkan nilai IPM apakah terjadi peningkatan atau justru penurunan seiring dengan semakin besarnya total pengeluaran pemerintah pada kurun waktu 25 tahun. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk “*time series*” yang bersifat kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka. Data yang digunakan adalah data realisasi APBD Kabupaten Jember dari tahun 1990-2014. Variabel yang di digunakan sebanyak 3 variabel. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Realisasi APBD di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember, 2) Realisasi APBD di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember, 3) Realisasi APBD di bidang infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember Periode 1990-2014”. Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya uluran tangan dan bantuan banyak pihak, berupa petunjuk, saran, baik moril maupun material. Untuk itu perkenankan saya dengan segala kerendahan hati serta penghargaan yang tulus untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang kepada:

1. Ibu Dra. Nanik Istiyani, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Aisah Jumiaty, S.E., M.P., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Adhitya Wardhono, SE., M.Sc., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan, terima kasih atas ilmu, nasihat, motivasi dan didikan kepada saya selama mejadi mahasiswa;
3. Bapak Dr. Rafael Purtomo, selaku kombing, terima kasih atas bantuannya;
4. Dr. Sebastianan Viphindratin, SE. M.Kes selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan.
5. Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan;
7. Rasa hormat dan terima kasih tiada batas untuk kedua orang tuaku tercinta Ibunda tersayang Mukhlasoh dan Ayahanda Rahmadi Chomsidarto yang dengan sabar, ikhlas, dan tak pernah mengeluh mendampingi serta

menyemangati penulis untuk menyelesaikan pendidikan. Terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, dan untaian doa yang selalu tercurahkan untukku;

8. Adikku Larassati yang telah memberikan motivasi dan semangat kepadaku;
9. Sahabat dan teman-temanku dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi terima kasih telah menjadi sahabat dan teman-teman yang mau menerima ku dengan baik, telah memberikan banyak cerita indah dalam perjalanan hidupku, kalian takkan tergantikan;
10. Teman-teman jurusan IESP angkatan 2011, bersama kalian aku belajar kebersamaan dan kebersamaan ini takkan terlupakan;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun tulis dan sebutkan satu per satu yang telah memberikan andil dan turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	Ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	Iii
HALAMAN MOTTO	Iv
HALAMAN PERNYATAAN	V
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	Vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	Vii
HALAMAN PENGESAHAN	Viii
ABSTRAK	Ix
ABSTRACT	X
RINGKASAN	Xi
PRAKATA	Xii
DAFTAR ISI	Xiv
DAFTAR TABLE	Xvii
DAFTAR GAMBAR	Xviii
DAFTAR LAMPIRAN	Xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Modal Manusia (<i>Human Capital Theory</i>).....	8
2.1.2 Teori Sumber Daya Manusia.....	9
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	10
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	14
2.1.5 Teori Penerimaan Pemerintah.....	15
2.1.6 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	16
2.1.7 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan	18
2.1.8 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan	21

2.1.9	Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur	23
2.1.10	Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	26
2.2	Tinjauan Penelitian Sebelumnya	30
2.3	Kerangka Konseptual.....	34
2.4	Hipotesis.....	35
BAB 3.	METODE PENELITIAN	36
3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4	Metode Analisis Data	37
3.4.1	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.4.2	Analisis Regresi Linier Berganda.....	39
3.4.3	Uji Statistik.....	40
3.5	Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya	42
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Gambaran Umum	44
4.1.1	Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Jember	44
4.2	Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	52
4.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember	52
4.2.2	Pengeluaran Pemerintah.....di.....Bidang.....Pendidikan..... Kabupaten Jember	53
4.2.3	Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Kabupaten Jember	55
4.2.4	Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur Kabupaten Jember	57
4.3	Analisis Data.....	58
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	59
4.3.1.1	Uji Multikolinearitas.....	59
4.3.1.2	Uji Heteroskedastisitas	59
4.3.1.3	Uji Autokorelasi	61

4.3.1.4 Uji Normalitas	62
4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda	63
4.3.3 Hasil Uji Hipotesis	65
4.3.3.1 Pengujian Signifikansi secara Simultan atau secara Bersama-sama (Uji F)	65
4.3.3.2 Pengujian Signifikansi secara Parsial atau secara Individu (Uji t)	66
4.3.3.3 Koefisien Determinasi (Uji R^2)	66
4.4 Pembahasan	67
BAB 5. PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, Jawa Timur, dan Kabupaten Jember pada Tahun 1990 - 2014	5
2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM	12
2.2 Kriteria Indeks Pembangunan Manusia.....	12
2.3 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	33
4.1 Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2014	44
4.2 Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Kecamatan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Jember Tahun 2013 Kemiringan Lahan Kabupaten Jember Tahun 2014.....	46
4.3 Indikator Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2009 – 2013.....	48
4.4 Banyaknya Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2013.....	49
4.5 Kondisi Ekonomi di Kabupaten Jember 2013.....	51
4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	61
4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	63
4.10 Hasil Uji t	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	34
4.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Tahun 1990 - 2014	53
4.2 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 1990 - 2014 (dalam jutaan rupiah)	54
4.3 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 1990 - 2014 (dalam jutaan rupiah)	56
4.4 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur Kabupaten Jember Tahun 1990 - 2014 (dalam jutaan rupiah)	57
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
4.6 Hasil Uji Durbin-Watson	61
4.7 Hasil Uji Normalitas	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur per Kabupaten/Kota Tahun 2014.....	79
Lampiran B Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Tahun 1990 - 2014	80
Lampiran C Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Kabupaten Jember (t-1) Tahun 1990 – 2014 (dalam jutaan rupiah).....	81
Lampiran D Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Kabupaten Jember (t-1) Tahun 1990 – 2014 (dalam jutaan rupiah).....	82
Lampiran E Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur Kabupaten Jember (t-1) Tahun 1990 – 2014 (dalam jutaan rupiah).....	83
Lampiran F Data IPM, Anggaran Pendapatan di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Tahun 1990 - 2014 di Kabupaten Jember	84
Lampiran G Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glajser.....	85
Lampiran H Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	86

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah faktor terpenting bagi kesejahteraan hidup suatu bangsa untuk mencapai tujuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh pembangunan sumber daya manusia. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci dari peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara.

Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu indikator peningkatan IPM adalah diukur dari kualitas tingkat pendidikan, indikator kualitas kesehatan, dan indikator kualitas ekonomi. Melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan ekonomi diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Di Indonesia, dimensi pendidikan dalam IPM diukur dengan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi kesehatan dalam IPM diukur dengan indikator angka harapan hidup dan dimensi ekonomi diukur dengan indikator pengeluaran perkapita (Mirza, 2012).

Selain kualitas hidup manusia, investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan investasi pemerintah diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004:122). Pada teori *human capital*, investasi produktif yang tertuju pada diri manusia sendiri yang didalamnya termasuk keterampilan, kecakapan, cita-cita, kesehatan dan sebagainya yang merupakan hasil pengeluaran atau pembelanjaan di bidang pendidikan, penyediaan, serta pengembangan program keterampilan kerja, program perawatan serta pemeliharaan kesehatan dan sebagainya. Pemerintah mempunyai peran penting dalam modal manusia. Kesuksesan dalam

pendidikan bergantung pada kecukupan kesehatan. Disamping itu kesehatan juga merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dengan pengalokasian belanja untuk peningkatan pembangunan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan (Todaro, 2006:34).

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi hanya berfokus pada pembangunan manusianya, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan peningkatan pembangunan manusia. Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM misalnya yang tercermin pada realisasi belanja daerah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana untuk menunjang investasi. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPM meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, maka taraf pendidikan masyarakat juga akan meningkat (Todaro, 2002:384; Astri, 2013).

Namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrudin (2011), Vegirawati (2012) dan Septiana (2015). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap IPM. Penelitian tersebut mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan manusia ditentukan oleh *sense of education* masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Dengan masyarakat yang sangat terbuka terhadap perubahan dari luar, membuat masyarakat mudah dipengaruhi tuntutan dari luar. Sehingga kualitas hidup manusia akan dipengaruhi oleh faktor dari luar, bukan dari pengeluaran pemerintah.

Selain dari sisi anggaran, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi IPM yakni apabila jumlah penduduk miskin di suatu daerah tinggi maka akan menurunkan IPM. Hal ini terjadi karena penduduk yang miskin mempunyai keterbatasan dalam mengakses kebutuhan mereka termasuk dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi oleh karena itu dapat menurunkan IPM. Pembangunan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Pada periode 2004 - 2009 pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sekitar 5,5%. Sementara itu pada periode 2009 - 2013 pemerintah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,9% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun sebelumnya. Walaupun mengalami penurunan di masa krisis pada tahun 1998 dengan peningkatan inflasi yang cukup tinggi, jatuhnya nilai tukar rupiah serta terpuruknya sektor riil dan pada akhirnya berujung pada krisis yang bersifat multidimensi. Krisis tersebut memunculkan gerakan reformasi, salah satu agenda reformasi 1998 adalah otonomi daerah yang pada dasarnya ingin menata kembali hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Kaloh, 2002:116).

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dijelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam TAP MPR tersebut menunjukkan bahwa peran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya otonomi daerah maka kapasitas dan potensi daerah dapat dioptimalkan, selain itu hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat lebih merata.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk

mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik (Kaloh, 2002:116).

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu: (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang yang besar untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal daerah dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPM di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 0,728 pada peringkat 107 dari 177 negara (survey oleh UNDP tahun 2007 – 2008). Indeks GDP Indonesia berdasarkan *Purchasing Power Parity* (PPP) mencapai 0,609 dengan nominal sebesar US\$ 3.843. Semakin angka PPP mendekati 1, maka kemampuan daya beli masyarakat semakin baik. Angka harapan hidup masyarakat Indonesia mencapai 69,7% per tahun atau dinyatakan dalam indeks harapan hidup mencapai 0,745%. Indeks pendidikan mencapai 0,83% dengan angka melek huruf sebesar 90,4% dan rata-rata rasio masuk sekolah dari SD sampai SMA mencapai 68,2% (UNDP, 2007).

IPM di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini merupakan hal yang positif bagi bangsa Indonesia dalam membentuk sumber daya yang unggul, tetapi jika dinilai perbandingannya dengan negara-negara maju seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Irlandia dan negara berkembang seperti Malaysia, Indonesia masih tertinggal dan Indonesia masih kesulitan untuk

bisa bersaing dengan negara–negara lainnya, khususnya dengan negara tetangga yang sudah sedemikian maju perkembangannya. Menurut *United Nations Development Programs* (UNDP) tahun 2013 IPM di Australia 93,8%, Selandia Baru 91,9%, Amerika Serikat 93,7%, Irlandia 91,6%, Malaysia 76,9% dan IPM Indonesia sebesar 73,98% jauh dibanding IPM di negara-negara maju dan berkembang seperti Malaysia.

IPM di Kabupaten Jember sendiri pada tahun 2014 berada pada peringkat 33 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Lampiran A). Peringkat IPM di Kabupaten Jember masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Kondisi IPM yang rendah akan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Dibandingkan dengan IPM di Indonesia dan Jawa Timur, kondisi IPM di Kabupaten Jember masih tertinggal cukup jauh. Dengan ketertinggalan tersebut, maka perlu adanya peningkatan IPM di Kabupaten Jember melalui peningkatan faktor yang mempengaruhi IPM. Perbandingan IPM di Indonesia, Jawa Timur dan Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Perbandingan IPM di Indonesia, Jawa Timur, dan Kabupaten Jember pada tahun 2009 – 2014 (%)

No.	Keterangan	Indeks Pembangunan Manusia						Jumlah	Rata-rata
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Indonesia	71,76	72,27	72,77	73,29	73,81	73,98	437,88	72,98
2.	Jawa Timur	71,06	71,62	72,18	72,83	73,54	73,78	435,01	72,50
3.	Kab. Jember	64,33	64,95	65,53	65,99	66,60	67,07	394,47	65,74

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2009 – 2014

Pada Tabel 1.1, dalam kurun waktu tersebut besarnya IPM Jawa Timur dibandingkan dengan IPM Indonesia masih dikatakan sedang/menengah ($50 < \text{IPM} < 80$), meskipun besarnya IPM meningkat setiap tahunnya. Begitupun dengan IPM di Kabupaten Jember setiap tahunnya meningkat dari tahun 2009 - 2014. Meskipun IPM setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi kondisi IPM di Kabupaten Jember masih tertinggal dengan IPM di Jawa Timur dan Indonesia. Dengan ketertinggalan ini, IPM harus ditingkatkan agar kualitas hidup masyarakat yang merupakan faktor IPM juga ikut meningkat.

Meskipun IPM di Kabupaten Jember meningkat, namun faktanya pada tahun 2014 angka putus sekolah di Kabupaten Jember naik dari 0,77% menjadi 1,02% (RKPD Jember, 2015). Kualitas kesehatan masyarakat juga belum terjamin, begitupun dengan kualitas ekonomi masih banyak masyarakat kurang mampu yang hidupnya belum sejahtera karena keterbatasan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu berdasarkan teori *human capital* diperlukan peran pemerintah dengan pengalokasian belanja untuk peningkatan pembangunan melalui kualitas ke 3 (tiga) indikator tersebut guna meningkatkan nilai IPM di Kabupaten Jember. Peran Pemerintah daerah Kabupaten Jember disini berupa penyedia anggaran belanja alokasi untuk memenuhi kebutuhan ke 3 (tiga) indikator tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas IPM di Kabupaten Jember (Todaro, 2006:34).

Dari latar belakang di atas mengingat pentingnya peran pemerintah daerah terhadap peningkatan IPM bagi kesejahteraan penduduk di Kabupaten Jember diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh anggaran pendidikan, kesehatan dan ekonomi pada bidang infrastruktur terhadap IPM di Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu kunci dari peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan IPM. Berdasarkan teori *human capital* diperlukan peran pemerintah dengan pengalokasian belanja untuk peningkatan pembangunan melalui pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur yang selanjutnya dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang, diadakan penelitian mengenai peranan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Jember;
2. Apakah anggaran belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Jember;
3. Apakah anggaran belanja pemerintah di bidang infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Jember;
2. Untuk mengetahui apakah anggaran belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Jember;
3. Untuk mengetahui apakah anggaran belanja pemerintah di bidang infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni;
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember, khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Studi Pembangunan (IESP) serta peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama;
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dalam peningkatan IPM di Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori modal manusia pertama kali diperkenalkan oleh Theodore W.Schultz. Teori ini mengatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah bentuk modal yang dapat digunakan sebagai investasi. Menurutnya, pendidikan, pelatihan dan kesehatan merupakan bentuk investasi untuk membuka kesempatan dan pilihan yang seharusnya tersedia bagi individu. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan dan kapasitas manusia yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Investasi ini dapat menghasilkan suatu aliran penghasilan masa depan dari perbaikan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan menjadi salah satu komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Peranan pendidikan di negara berkembang untuk membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2002:384).

Menurut Sumarsono (2003:48), pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan demikian pendidikan dan pelatihan merupakan *human investment* yang hasilnya dapat dirasakan beberapa tahun kemudian bagi suatu negara atau daerah. Studi tentang investasi sumber daya manusia telah dilakukan oleh Schultz sekitar tahun 1960an. Schultz berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif. Beberapa kegiatan yang dapat memperbaiki kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan formal yang memiliki hubungan erat dengan peningkatan

kemampuan sumber daya manusia. Teori ini meyakini bahwa pendidikan merupakan suatu yang baik bagi individu maupun masyarakat (Ananta, 1993:50).

Modal manusia (*human capital*) adalah segenap investasi produktif yang tertuju kepada diri manusia sendiri. Didalamnya termasuk keterampilan, kecakapan, cita-cita, kesehatan dan sebagainya yang merupakan hasil pengeluaran atau pembelanjaan di bidang pendidikan, penyediaan, serta pengembangan program keterampilan kerja, program perawatan serta pemeliharaan kesehatan dan sebagainya. Pemerintah mempunyai peran penting dalam modal manusia. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung pada kecukupan kesehatan. Disamping itu kesehatan juga merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2006:34).

2.1.2 Teori Sumber Daya Manusia

Sebagian besar ekonom sepakat bahwa sumber daya manusia (*human resources*) dari suatu bangsa, merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan. Keyakinan para ekonom tersebut antara lain nampak jelas pada pernyataan almarhum Profesor Frederick Harbison dari Princeton University:

“Sumber daya manusia...merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif; manusialah agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasikan sumber-sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan pembangunan nasional. Jelaslah, bahwa jika suatu negara tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional, maka untuk selanjutnya negara tersebut tidak akan dapat mengembangkan apa pun” (Todaro, 2002:384).

Ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia meliputi dimensi,

mutu penyebaran penduduk di berbagai kegiatan dan daerah, karena itu sumber daya manusia memiliki aspek-aspek yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi jumlah penduduk, penduduk usia kerja atau jumlah angkatan kerja yang dapat dibedakan menurut umur, jenis kelamin, sedangkan aspek kualitas sumber daya manusia sangat beragam, seperti kualitas angkatan kerja yang dapat diterjemahkan dalam pendidikan, keterampilan kerja, sikap kerja dan nilai. Kualitas sumber daya manusia juga dapat dinyatakan dalam bentuk kesehatan, gizi, pendidikan, dan status pekerjaan (Fatimah, 2015).

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengutip isi *Human Development Report (HDR)* pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2013).

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Susilo (2002:3) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus roda penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. Maka dari itu, Sumber Daya

Manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan. Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara khususnya bagi negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan karena banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan, selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional (Tambunan, 2003:15).

Dalam perhitungan IPM, tahapan pertama penghitungan IPM adalah sebagai berikut (BPS, 2013):

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

Dimana:

- X_i = Indikator IPM ke- i ($i=1,2,3$)
 X_{\max} = nilai maksimum X_i
 X_{\min} = nilai minimum X_i

Persamaan tersebut akan menghasilkan nilai $0 < X_i < 1$, untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi $0 < X_i < 100$. Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis:

$$\begin{aligned} \text{IPM} &= 1/3 X_i \\ &= 1/3 (X_1 + X_2 + X_3) \end{aligned}$$

Dimana:

- X_1 = indeks angka harapan hidup
 X_2 = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)
 X_3 = indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan

Tinggi rendahnya indikator IPM dapat dilihat menggunakan nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing indikator tersebut. Nilai maksimum dan nilai minimum indikator IPM dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi Per Kapita yang Disesuaikan (000)	732,7	300,0 (1996) 360,0 (1999) (2002)	UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Jika nilai indikator IPM yang diperoleh diatas nilai maksimum, maka indikator tersebut dapat dikategorikan tinggi. Jika nilai yang diperoleh diantara nilai maksimum dan minimum, maka indikator dapat dikategorikan sedang. Serta jika nilai dibawah nilai minimum, maka indikator dikategorikan rendah. Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0. Kriteria IPM tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2: Kriteria IPM

No.	Keterangan	Kriteria
1.	Tinggi	IPM lebih dari 80,0
2.	Menengah Atas	IPM antara 66,0 – 79,9
3.	Menengah Bawah	IPM antara 50,0 - 65,9
4.	Rendah	IPM kurang dari 50,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Kriteria tersebut dapat dijadikan tolak ukur IPM. Dengan kriteria tersebut, maka dapat diketahui tingkat IPM yang diukur dari komponen IPM di suatu wilayah. Berikut ini uraian masing-masing komponen IPM:

1. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka rata-rata lama sekolah), dimana tingkat pengetahuan merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka melek huruf merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Di Indonesia menggunakan “rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan” (*adjusted real per capita expenditure*) atau daya beli yang disesuaikan (*purchasing power parity*).

Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Darwanto (2007), anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No.17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Pada Permendagri nomor 13 tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung tanggal 1 Januari sampai 31 Desember”. Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan aktiva atau pengurangan utang yang bukan berasal dari kontribusi ekuitas Pemerintah Daerah.

2. Belanja Daerah

Menurut Halim (2006) definisi Belanja Daerah adalah semua anggaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dibayar atau akan diterima kembali yang dimaksudkan untuk mencapai defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin inofatif yaitu dapat memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah (Halim, 2006).

2.1.5 Teori Penerimaan Pemerintah

Sumber-sumber penerimaan keuangan pemerintah daerah dapat meliputi (Chalid,2005:1):

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber pendapatan asli dari daerah, bukan merupakan pemberian bantuan, hibah, penyertaan modal dan sebagainya. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik (Wijaya, 2005). Dana perimbangan dalam UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.33/2004 adalah terdiri (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi Umum; (c) Dana Alokasi Umum.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan mekanisme yang di berikan kepada daerah dalam rangka mencari pos keuangan daerah di luar anggaran pendapatan daerah (APBD). Pemerintah daerah dapat memperoleh pinjaman daerah setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memegang peranan penting terutama pembangunan infrastruktur. Pinjaman daerah bisa berbentuk pinjaman dari dalam negeri atau luar negeri.

2.1.6 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat (Fatimah, 2015). APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut.

Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus memperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkatkan pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. Belanja daerah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu: Pertama, belanja rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai,

belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Kedua, belanja pembangunan yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu (Dumairy, 1997:157).

Menurut teori *human capital* bahwa pengeluaran pemerintah di berbagai bidang dapat meningkatkan kualitas penduduk yang selanjutnya akan meningkatkan IPM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan di bidang pertanian, tenaga listrik dan pengairan. Di samping itu juga dilakukan pengadaan prasarana pendukung telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan. Pengeluaran pemerintah dapat ditinjau dari berbagai segi seperti sebagai berikut (Rahayu, 2010:210):

1. Pengeluaran yang merupakan investasi, yaitu yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi pada masa yang akan datang;
2. Pengeluaran yang secara langsung dapat memberikan kegembiraan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
3. Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang;
4. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Penyusunan belanja pembangunan selalu didasarkan pada kebutuhan nyata dari masyarakat tingkat bawah, untuk menentukan alokasi belanja pembangunan terhadap proyek-proyek yang dibangun, inisiatif harus datang dari masyarakat itu

sendiri melalui lembaga pemerintahan yang berada ditingkat bawah. Menurut teori pengeluaran wagner, teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan IPM. Tendensi ini oleh wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Pada dasarnya ada dua fungsi utama dari fungsi APBD yaitu untuk penyelenggaraan pemerintah (pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan), dan stimulus pertumbuhan ekonomi (Rahayu, 2010:270).

Adapun belanja investasi/pembangunan terdiri dari:

1. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang berupa investasi fisik pembangunan infrastruktur yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan asset daerah.
2. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberi manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.
3. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria:
 - a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan;
 - b. Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman;
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga

investment in human capital. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah. Asumsi yang digunakan dalam teori *human capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori *human capital* dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Todaro, 2002:384).

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Teori investasi sumber daya manusia pada dasarnya mempercayai bahwa penghasilan seumur hidup dari mereka yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih besar daripada penghasilan seumur hidup mereka yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, kendati biaya tidak langsung dan biaya langsung dari pendidikan yang juga lebih tinggi sudah ikut diperhitungkan. Dengan kata lain investasi dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia itu menguntungkan. Keuntungannya tidak hanya dipetik oleh orang yang mendapatkan pendidikan itu sendiri (*private rate of return*) melainkan juga dipetik oleh masyarakat luas (*social rate of return*). Semakin tinggi kualitas hidup/investasi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan

berpengaruh juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (Tjiptoherijanto, 1996:73). Dalam hasil penelitian Setiawan (2006) ini sependapat dengan teori tersebut yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Komponen-komponen Pendidikan yaitu (BPS, 2015):

1. Bersekolah: mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/ sederajat) maupun non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Kementerian Agama (Kemenag), instansi lainnya negeri maupun swasta;
2. Pendidikan formal: jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT;
3. Pendidikan nonformal: jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
4. Tidak/belum pernah sekolah: tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar;
5. Tamat sekolah: telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat;

6. Angka Buta Huruf: proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu;
7. Angka Partisipasi Sekolah (APS): proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut;
8. Angka Partisipasi Murni (APM): proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya;
9. Angka Partisipasi Kasar (APK): proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut;
10. Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan: jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah;
11. SD meliputi: Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat;
12. SMP meliputi: jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat;
13. SM meliputi: jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat;
14. PT meliputi: jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

2.1.8 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang

sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah (Haryanto, 2005).

Pada penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan (Haryanto, 2005).

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam investasi sumber daya manusia adalah berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk secara langsung akan meningkatkan kualitas angkatan kerja. Ini terjadi karena peningkatan kesehatan akan mengurangi tingkat kesakitan penduduk. Investasi di bidang kesehatan merupakan investasi modal manusia yang akan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Hal ini mendasari pemikiran bahwa dengan status kesehatan yang baik akan meningkatkan kemampuan belajar, menurunkan tingkat bolos kerja dan meningkatkan hasil kerja (Tjiptoherijanto, 1996:82).

Tingkat kesehatan fisik seseorang berhubungan erat dengan tingkat pendapatan dan tingkat produktivitasnya. Konsumsi gizi yang rendah, kebiasaan makan makanan yang buruk, tidak sehat dan standar higienis yang rendah dapat menghambat perkembangan fisik dan mental seseorang. Tingkat produktivitas seseorang yang rendah barangkali tidak semata-mata disebabkan oleh kelangkaan sumber daya pelengkap, tetapi juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan dan

kelesuan fisiknya, baik fisik maupun emosional untuk dapat bertahan terhadap beban pekerjaan sehari-hari yang terlampau berat.

Perlu adanya perbaikan lingkungan, baik lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja termasuk dalam lingkungan kerja. Sedangkan lingkungan masyarakat menyangkut masalah lingkungan tempat tinggal (fisik dan non fisik), perbaikan gizi masyarakat, dan lainnya yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Faktor-faktor ini secara langsung akan berpengaruh pada kinerja (*performance*) fisik dan pada mental pekerja. Kualitas fisik dan mental pekerja yang bagus selanjutnya akan berpengaruh positif pada kapasitas kerja. Pada dasarnya penduduk tidak hanya berperan sebagai manusia pekerja, yang membantu menciptakan *output* bersama sama dengan faktor produksi tradisional lainnya. Peranan penduduk tersebut dapat dikembangkan lebih jauh, yakni bagaimana agar penduduk mempunyai kemampuan berinovasi terus menerus (*continous innovation capability*), penanaman modal (*capital accumulation*), pengembangan energi, teknik produk (*production technique*) serta manajemen (Todaro, 1995:126).

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari penerapan teori *human capital* dibidang perbaikan gizi dan kesehatan adalah perlunya usaha memerangi kemiskinan. Secara umum kesehatan akan berkorelasi dengan produktivitas penduduk maupun pekerja. Meningkatnya derajat pada kesehatan, memperpanjang masa kerja dan daya tahan tubuh yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003:405).

2.1.9 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa

subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti sarana perumahan dan fasilitas umum. Fasilitas umum seperti transportasi berperan sebagai tulang punggung dalam proses produksi maupun dalam menunjang mobilisasi manusia dan distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Sarana dan prasarana lainnya juga merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Hal tersebut dapat terlihat dari kenyataan bahwa daerah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Prasarana ekonomi (*economic infrastructure*) adalah akumulasi modal dasar ekonomi (baik fisik maupun finansial) yang diwujudkan dalam jaringan jalan darat, jalan kereta api, angkutan laut, angkutan udara, dan berbagai bentuk serta fasilitas transportasi dan komunikasi lainnya. Penyediaan air bersih, lembaga-lembaga keuangan yang stabil, penyediaan listrik, serta pelayanan masyarakat lainnya seperti kesehatan umum dan pendidikan. Tingkat pembangunan infrastruktur atau kualitas prasarana ekonomi di suatu negara merupakan faktor yang sangat penting yang menentukan kelancaran dan diversifikasi pembangunan ekonomi (Todaro, 2006:406).

Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Deni Friawan (2008) menjelaskan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya studi *The World Bank* (2004) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi

rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia.

Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani sektor-sektor terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan mengembangkan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan. Di saat bersamaan, mengingat mobilisasi investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi, salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur. Namun jika pengeluaran pemerintah saja tidak cukup diperlukan peran pihak swasta. Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian pihak swasta adalah dengan bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional dan modal, dan jaminan resiko usaha. Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan agar terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang dan pembangunan.

Pertumbuhan penduduk sudah tentu membawa konsekuensi penyedia fasilitas umum yang memadai dan perumahan yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk. Jika masalah infrastruktur tidak terpenuhi dalam kehidupan masyarakat maka akan berdampak juga pada lemahnya daya saing penduduk. Terkendalanya infrastruktur tersebut berujung pada rendahnya produktivitas individu. Seperti yang diketahui juga bahwa kemampuan daya saing

produk Indonesia di pasaran ASEAN menuntut ketersediaan infrastruktur yang memadai (Fatimah, 2015).

2.1.10 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada 3 (tiga) hal, yaitu: proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (*self generating*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor–faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi serta bagaimana antara faktor–faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Faktor–faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno 1994:10):

1. Tanah dan kekayaan alam lain

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa–masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah akan mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibat buruk dari penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor–faktor produksi yang tersedia.

3. Barang–barang modal dan tingkat teknologi

Barang–barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang–barang modal yang sangat bertambah

jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sikap masyarakat akan menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Adam Smith telah menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luas pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi.

Menurut ekonomi klasik, Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi secara klasik dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik (Sukirno, 2006:243).

Menurut teori pertumbuhan neo klasik tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000:117).

Mankiw, Romer dan Weil (MRW) melakukan modifikasi terhadap model pertumbuhan neo klasik dimana mereka mengusulkan pemakaian variabel akumulasi modal manusia (*human capital*). Sumber pertumbuhan ekonomi dengan demikian berasal dari pertumbuhan capital, tenaga kerja dan modal manusia. Hasil estimasi yang dihasilkan dari model MRW ternyata lebih baik dibandingkan dengan model neo klasik.

Teori pertumbuhan baru memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari hanya sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja

tapi menyangkut modal manusia. Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006:222).

Pertumbuhan ekonomi memperluas dan memperbesar pemenuhan materi untuk kebutuhan manusia. Sejauh mana kebutuhan tersebut terpenuhi tergantung dengan alokasi sumber daya, distribusi ekonomi dan peluang kerja dalam perekonomian. Pertumbuhan dan IPM mempunyai hubungan dua arah yang meskipun tidak berhubungan secara otomatis namun dapat diperkuat dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Ketika pertumbuhan dan IPM mempunyai hubungan yang kuat, mereka saling berkontribusi satu sama lain, tetapi ketika hubungan tersebut lemah mereka akan “merusak” yang lainnya. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dipengaruhi dua rantai utama, yaitu kegiatan/aktifitas dan pengeluaran rumah tangga (*household activities and expenditure*) dan kebijakan dan pengeluaran pemerintah (*government policy and expenditure*) (Todaro, 2000:111).

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen (Todaro, 2000:117).

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksudnya tetap sama. Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:5). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002:29) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Prof. Meier (dalam Adisasmita, 2005:205) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Sadono Sukirno (2006:243) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Schumpeter (dalam Suryana, 2000:5), pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

2.2. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat penelitian–penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain:

Penelitian pertama mengenai pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanja daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dilakukan oleh Rudy Badrudin dan Mufidhatul Khasanah (2011). Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” menggunakan data *time series* dari periode tahun 2004 - 2008. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda yang menggunakan alpha 5%. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada anggaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM.

Penelitian kedua oleh Adi Widodo, Waridin dan Johanna Maria K (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah” penelitian menggambarkan tentang pola pengembangan pengeluaran publik pada bidang pendidikan dan kesehatan, indikator pembangunan manusia dan indikator kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data *time series* 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diukur dalam satuan angka periode 2007 sampai 2008 . Metode yang dipakai adalah regresi berganda dengan variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, IPM dan tingkat kemiskinan daerah. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada tahun 2007 dan 2008, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, IPM dan persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak hanya diikuti oleh peningkatan IPM tetapi juga oleh penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

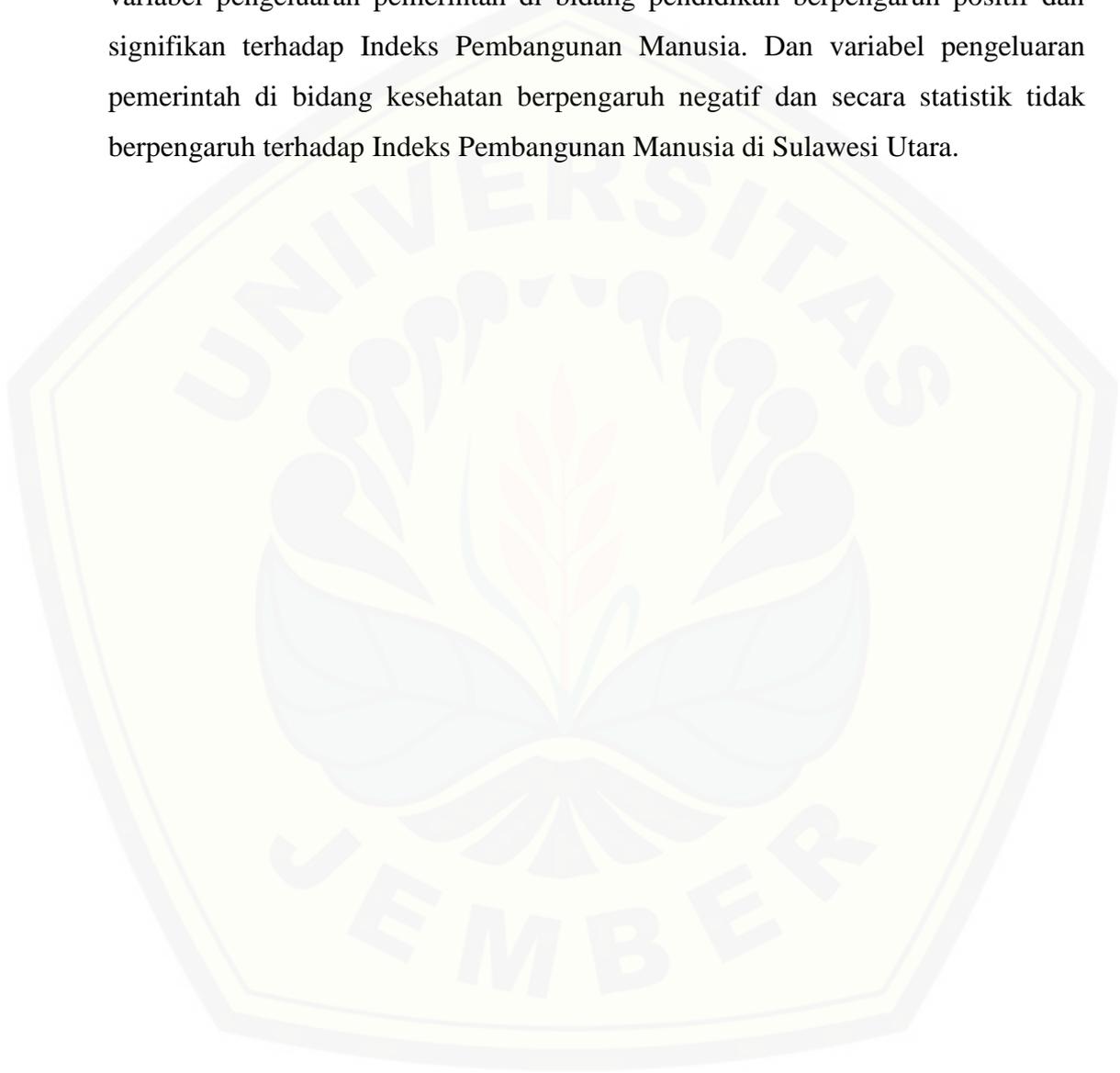
Penelitian ketiga oleh Titin Vegirawati (2012) dengan judul “Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan)“. Tujuan dari

penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh alokasi belanja langsung terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah diproses oleh Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan data dari Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui *website*. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara alokasi belanja langsung terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian keempat oleh Meylina Astri, Sri Indah Nikensari dan Harya Kuncara W (2013) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan pengeluaran pemerintah di Indonesia khususnya jangka waktu 2007- 2008 dengan metode statistik inferensial (induktif). Jenis data yang digunakan adalah data *time series*, dengan data sekunder yang dipublikasi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan lembaga lainnya. Pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 17.0. Hasil penelitian ini adalah secara bersama-sama terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM, namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM.

Penelitian kelima oleh Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumate, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap

Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Analisis penelitian menggunakan model analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.

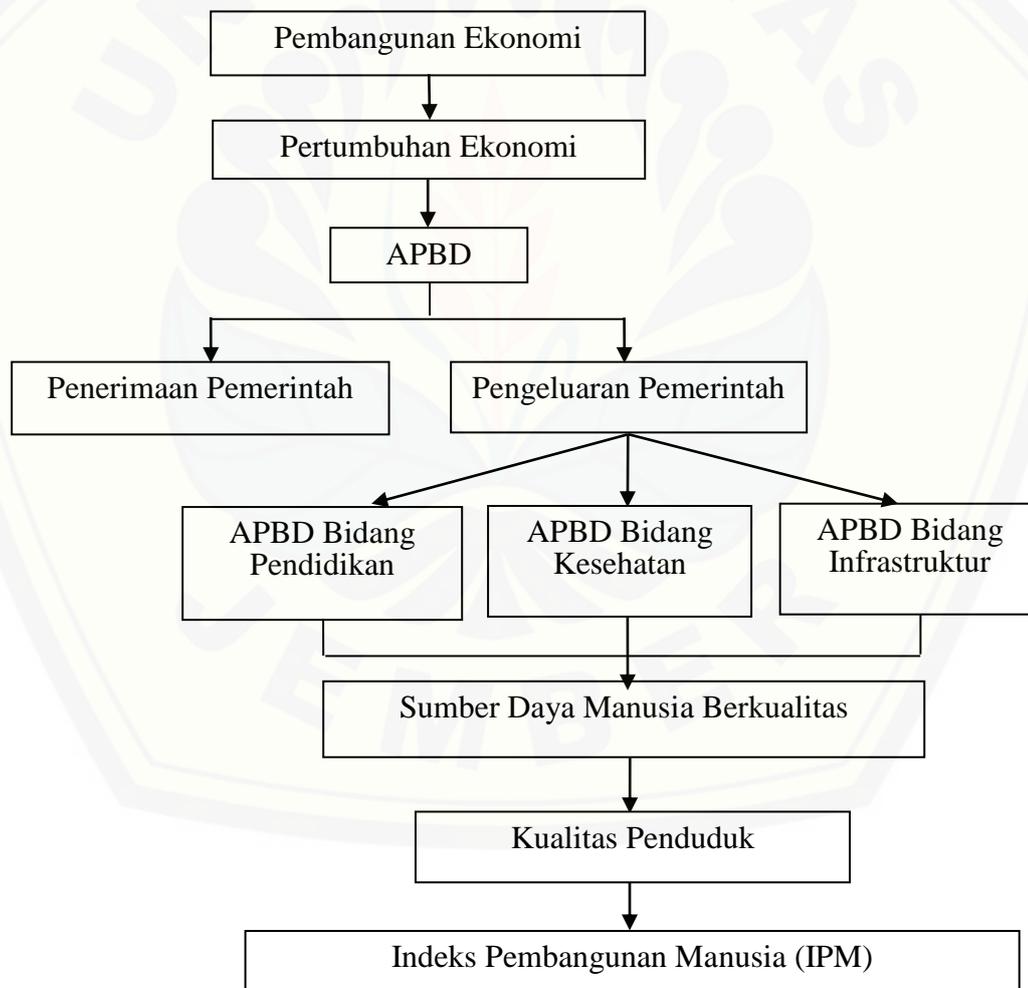


Tabel 2.3: Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
Rudy Badrudin dan Mufidhatul Khasanah (2011).	Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	APBD bidang pendidikan, APBD bidang kesehatan, APBD bidang infrastruktur, IPM.	Metode analisis regresi berganda yang menggunakan alpha 5%.	Anggaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.
Adi Widodo, Waridin dan Johanna Maria K (2011).	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.	APBD bidang pendidikan dan kesehatan, IPM dan kemiskinan.	Analisis regresi berganda.	Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, IPM berpengaruh positif terhadap penduduk miskin.
Titin Vegirawati (2012)	Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan).	Alokasi belanja langsung dan IPM.	Analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS versi 16.0	Alokasi belanja langsung tidak signifikan berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia.
Meylina Astri, Sri Indah Nikensari dan Harya Kuncara W (2013).	Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan di Indonesia.	Pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Statistik inferensial (induktif).	Hasil dari persamaan regresi berganda, secara bersama-sama terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh positif pada IPM, namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM.
Septiana M. M. Sannggelorang, Vekie A. Rumat, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015).	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.	APBD bidang pendidikan, APBD bidang kesehatan dan IPM.	Analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 21.	Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.

2.3 Kerangka Konseptual

Pembangunan ekonomi merupakan faktor terpenting bagi kesejahteraan hidup suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pengalokasian anggaran belanja pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka kualitas penduduk akan meningkat dan selanjutnya juga akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kerangka konseptual yang mendasari penelitian tentang indeks pembangunan manusia:

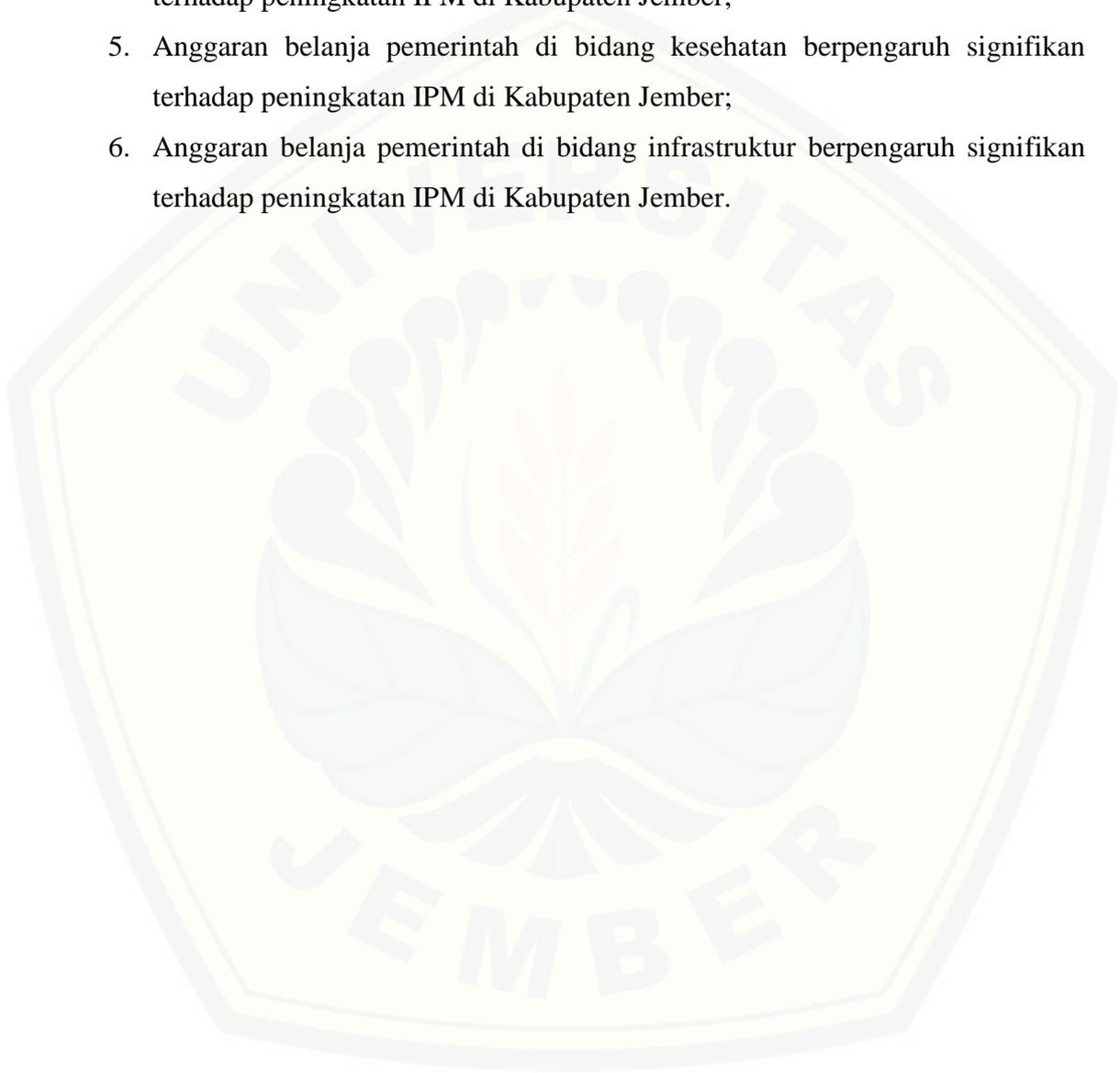


Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

4. Anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Jember;
5. Anggaran belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Jember;
6. Anggaran belanja pemerintah di bidang infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Jember.



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey penjelasan (*explanatory survey*). Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menggunakan suatu metode yang menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti dan bertujuan untuk mencari ada atau tidaknya pola hubungan dan sifat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta untuk menguji hipotesis bahkan menemukan teori baru (Nasir, 1998:45).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember dengan mengamati dan menganalisa pengaruh alokasi realisasi APBD untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM di Kabupaten Jember dari tahun 1990 - 2014. Pengukuran APBD tahun 1990 sampai 2014 ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat membandingkan nilai IPM apakah terjadi peningkatan atau justru penurunan seiring dengan semakin besarnya total pengeluaran pemerintah pada kurun waktu 25 tahun.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk “*time series*” yang bersifat kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka. Data yang digunakan adalah data realisasi APBD.

Kabupaten Jember dari tahun 1990 - 2014, sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, serta dari berbagai literatur.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model regresi linier berganda, maka langkah selanjutnya yang dilakukan apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Metode ini mempunyai kriteria bahwa pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta, dan efisien. Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain: tidak ada multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan model berdistribusi normal.

1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui apakah antar variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel dan apabila korelasinya signifikan maka antar variabel bebas tersebut terjadi multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *variance inflato factor* (VIF) dan nilai toleransi. Antara variabel independen dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai $VIF < 10$ (Ghozali, 2005:92).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di *standardized*. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali, 2005:105):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas;

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan juga dengan menggunakan Uji Glajser (*Glajser Test*) atau uji Park (*Park Test*). Uji Glajser dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen. Apabila hasil regresi *absolute* terhadap seluruh variabel independen mempunyai nilai t_{hitung} yang tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa model lolos dari adanya heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas (Widarjono, 2007:127).

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah uji yang digunakan apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t , dengan kesalahan pada periode $t-1$. Selain itu mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dengan cara melihat besarnya nilai D-W (*Durbin-Watson*). Patokan umum yang dapat dijadikan batasan adalah (Ghozali, 2005:95):

- a. Bila nilai D-W lebih besar dari batas atas (d_U), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada autokorelasi positif;
- b. Bila nilai D-W lebih rendah dari batas bawah (d_L), maka koefisien autokorelasi sama lebih besar nol, yang berarti ada autokorelasi positif;
- c. Bila nilai D-W terletak di antara batas atas (d_U) dan batas bawah (d_L), maka tidak dapat disimpulkan.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah (Ghozali, 2005:110):

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menaksir dan menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linier berganda adalah metode kuadrat terkecil atau disebut juga metode *ordinary least square* (OLS). Metode OLS bertujuan meminimumkan jumlah kuadrat error. Realisasi APBD bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak dapat langsung mempengaruhi tingkat IPM di tahun yang sama. Maka untuk melihat efeknya terhadap IPM dibutuhkan adanya “*time lag*”. Hal yang perlu diperhatikan dalam perekonomian adalah jarang terdapat reaksi yang ditimbulkan oleh suatu aksi secara seketika. Namun, hal ini memerlukan selang waktu atau *time lag* (kelambanan) (Gujarati, 2003:124).

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Didasari pemikiran adanya hubungan antara IPM dengan pengeluaran pemerintah melalui APBD dimunculkan formulasi hubungan regresi linear berganda sebagai berikut (Badrudin, 2011):

$$Y_{(t-1)} = \beta_0 + \beta_1 X_{1(t-1)} + \beta_2 X_{2(t-1)} + \beta_3 X_{3(t-1)} + \dots \dots \dots \beta_n X_{n(t-1)} + e \dots \dots \dots (3.1)$$

Hubungan antarvariabel merupakan hubungan yang memiliki *time lag* dengan masing-masing variabel independen memiliki tenggang waktu pengaruh sebesar (t-1), sehingga formulasi hubungan yang baru adalah (Badrudin, 2011):

$$IPM_{(t-1)} = \beta_0 + \beta_1 Pd_{(t-1)} + \beta_2 Ks_{(t-1)} + \beta_3 Inf_{(t-1)} + e \dots \dots \dots (3.2)$$

keterangan:

IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
Pd	=	APBD Bidang Pendidikan pada 1 tahun sebelumnya
Ks	=	APBD Bidang Kesehatan pada 1 tahun sebelumnya
Inf	=	APBD Bidang Infrastruktur pada 1 tahun sebelumnya
β_0	=	Konstanta (nilai IPM apabila Pd, Ks, Inf = 0)
β_1	=	Koefisien pendidikan
β_2	=	Koefisien Kesehatan
β_3	=	Koefisien Infrastruktur
e	=	Frekuensi gangguan stokhastik

3.4.3 Uji Statistik

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, baik secara serentak maupun secara parsial.

1. Uji F-Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui secara simultan (serentak) apakah koefisien regresi variabel independen mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji hipotesis. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F yang dihasilkan dari perhitungan F_{hitung} dengan nilai signifikansi. Dengan formulasi yang dipergunakan adalah (Prayitno, 2010:67):

$$F_{hit} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Dimana:

F = pengujian secara simultan

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah observasi

k = banyaknya variabel

Formulasi hipotesis uji F:

1) $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$

H_0 ditolak dan H_a diterima, ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) terhadap variabel terikat (Y).

2) $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$

H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada pengaruh simultan antara variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) terhadap variabel terikat (Y).

3) *Level of significance* 5%

4) Pengambilan keputusan:

a) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$: H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat;

b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$: H_0 ditolak, berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji t

Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dapat dirumuskan (Prayitno, 2010:68):

$$t = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Dimana:

t = test signifikan dengan angka korelasi

b_i = koefisien regresi

Se (b_i) = standart error dari koefisien regresi

Formulasi hipotesis uji t:

1) $H_0 : \beta_i = 0, i = 1, 2, 3, 4$

Tidak ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

2) $H_a : \beta_i \neq 0, i = 1, 2, 3, 4$

Ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

3) *Level of significane* 5% (Uji 2 sisi, 5% : 2 = 2,5% atau 0,025)

4) Pengambilan keputusan:

a. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$: H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat;

b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$: H_0 ditolak, berarti ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

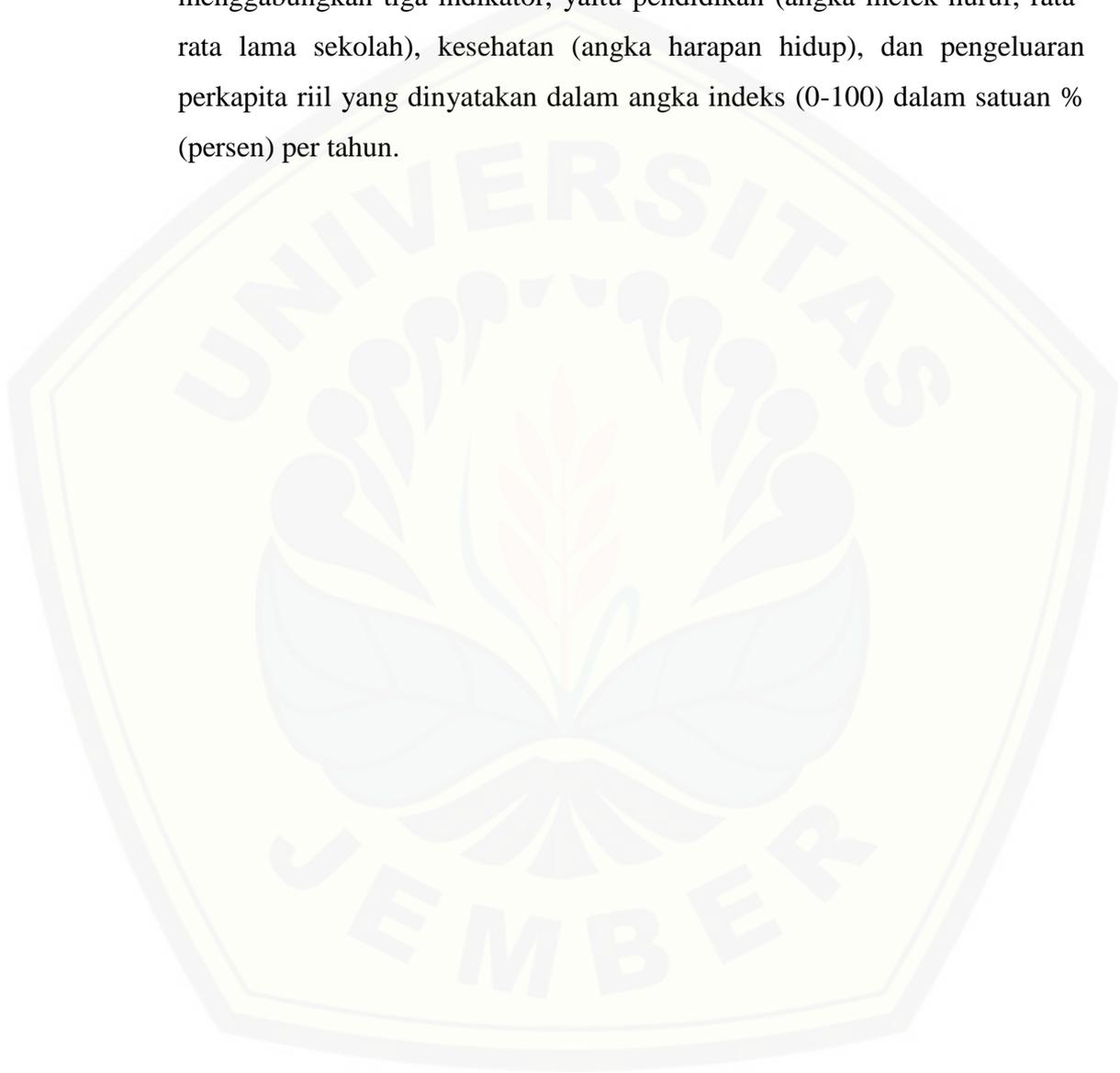
R^2 digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi linear berganda. Jika R^2 yang diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini dalam mencari R^2 (*R Square*) menggunakan program SPSS.

3.5 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Definisi variabel operasional yang digunakan dalam pengukuran ini, antara lain:

1. Anggaran belanja pendidikan (Pd) adalah anggaran belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai fungsi pendidikan yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah per tahun (Rp. Juta/Tahun);
2. Anggaran belanja kesehatan (Ks) adalah anggaran belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai fungsi kesehatan yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah per tahun (Rp. Juta/Tahun);

3. Anggaran belanja infrastruktur (Inf) adalah anggaran belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai fungsi infrastruktur yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah per tahun (Rp. Juta/Tahun);
4. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggabungkan tiga indikator, yaitu pendidikan (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup), dan pengeluaran perkapita riil yang dinyatakan dalam angka indeks (0-100) dalam satuan % (persen) per tahun.



BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan yang jumlahnya relatif meningkat akan menghasilkan masyarakat yang berproduktivitas tinggi sehingga kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan juga akan meningkat;
2. Realisasi anggaran belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan realisasi anggaran belanja pemerintah di bidang kesehatan yang relatif meningkat akan meningkatkan kualitas fisik angkatan kerja sehingga produktivitas dan pendapatan tenaga kerja juga akan meningkat;
3. Realisasi anggaran belanja pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah di bidang infrastruktur yang relatif meningkat akan memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik. Jika infrastruktur memiliki sistem kelengkapan yang baik maka tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah di Kabupaten Jember disarankan lebih memperhatikan anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan, dengan cara menjaga dan mengawasi pengalokasian anggaran pemerintah agar pengalokasian anggaran tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yaitu peningkatan kualitas pendidikan seperti peningkatan sarana prasarana belajar dan peningkatan kualitas pengajar;
2. Pihak pemerintah di Kabupaten Jember disarankan lebih memperhatikan anggaran belanja pemerintah di bidang kesehatan, dengan cara menjaga dan mengawasi pengalokasian anggaran pemerintah agar pengalokasian anggaran tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas kesehatan seperti peningkatan sarana prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
3. Pihak pemerintah di Kabupaten Jember disarankan lebih memperhatikan anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan, dengan cara menjaga dan mengawasi pengalokasian anggaran pemerintah agar pengalokasian anggaran tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan peningkatan infrastruktur dengan cara perbaikan infrastruktur yang sudah ada dan melakukan pengembangan infrastruktur;
4. Pihak pemerintah di Kabupaten Jember disarankan agar menerapkan program kesehatan gratis dan bantuan untuk pendidikan serta dibarengi dengan program pembangunan infrastruktur fisik dan sosial yang lebih baik lagi agar mempercepat kemajuan pembangunan manusia khususnya di daerah pedesaan yang masih terkendala letak geografisnya;
5. Pihak peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendekati fenomena sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris. 1993. *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Demografi dan Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Algifari. 1997. *Analisis Statistik Untuk Bisnis; Dengan Regresi, Korelasi dan Nonparametrik*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Adisasmita. H.R. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Astuti, Esther. S dan Tri Haryanto, Joko. 2005. Analisis Dana Alokasi Umum dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus 30 Propinsi. *Majalah Manajemen. Usahawan Indonesia*. No.12/TH.XXXIV.
- Abdullah, Syukri dan Halim, Abdul. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 No. 2, November.
- Astri, Meylina. S.Pd, Nikensari, Sri. Indah. SE, M.Si, Dr. Kuncara W. Harya. SE, M.Si. 2013. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 1, No. 1, Maret 2013. ISSN: 2302-2663.
- BPS, BAPPENAS, UNDP. 2001. *Indonesia Human Development Report 2001*. Jakarta: BPS. <http://www.bps.go.id/> diakses 10 Agustus 2015.
- BPS, BAPPENAS, UNDP. 2004. *Indonesia Human Development Report 2004*. Jakarta: BPS. <http://www.bps.go.id/> diakses 10 Agustus 2015.
- BPS Kabupaten Jember. 2004. *Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember*. <http://www.bps-jember.go.id/> diakses 10 Agustus 2015.
- BPS, BAPPENAS, UNDP. 2007. *Indonesia Human Development Report 2007*. Jakarta: BPS. <http://www.undp.or.id/mdg/index.asp> diakses pada 10 Agustus 2015.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2010. *Kabupaten Jember Dalam Angka. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. <http://www.bps-jember.go.id/> diakses 10 Agustus 2015.*
- Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah. 2011. "Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Buletin Ekonomi*. Vol. 9, No. 1, April 2011 hal 1-82.
- BPS Jawa Timur. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur. <http://www.bps-jatim.go.id/> diakses pada 10 Agustus 2015.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2010. *Kabupaten Jember Dalam Angka. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. <http://www.bps-jember.go.id/> diakses 10 Agustus 2015.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2014. *Kabupaten Jember Dalam Angka. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. <http://www.bps-jember.go.id/> diakses 10 Agustus 2015.*
- BPS Kabupaten Jember. 2015. *Konsep Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur. <http://www.jemberkab.bps.go.id/Subjek/view/id/26> diakses pada 10 Agustus 2015.*
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar: Universitas Hasanudin 26-27 Juli 2007.
- Friawan, Deni. 2008. Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia CSIS. *Jurnal Ekonomi*. Vol 37. No. 2 juni. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Fatimah et al. 2015. Peranan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur Dalam Peningkatan Kualitas Penduduk. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Gujarati, Damodar. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. 2003. Jakarta: Erlangga.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaloh, J, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Kusreni, Sri & Suhab, Sultan. 2009 Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat Di Propinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol 5, No.3, 2009.

Kementrian Keuangan. 2015. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD)*. Diakses dari *World Wide Web*: www.djpk.kemenkeu.go.id pada 10 Agustus 2015.

Lugastoro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal*. Malang: Universitas Brawijaya.

M. Nasir. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.

Mankiw, Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga.

Niken Wilantari, Regina. 2012. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jember Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal ISEI Jember*. Volume 2 Nomor 2, Oktober 2012.

Novitasari, Evi. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur 2009-2013). *Jurnal*. Malang: Universitas Brawijaya.

Prishardoyo, Bambang. 2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. *Jurnal JEJAK*. Volume 1. Nomor 1. September, 2008.

Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.

- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Santoso, S. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Swastha, Basu dan Irawan. 2002. *Manajemen Pemasaran Modern*. Edisi Kedua. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010 . *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sasana, Hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal*. Vol 25. No 1 Januari 2012.
- Sulistio Mirza, Denni. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009. *Jurnal Ekonomi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sanggalorang, Septiana M. M., Vekie A. Rimate dan Hanly F.DJ. Siwu. 2015. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No. 02, Edisi Juli 2015.
- T. Tarmidi, Lepi. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Todaro, Michael P. 1995. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith . 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I. Edisi Ke Tujuh. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith . 2002. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Dua. Jakarta: Erlangga.

- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tulus, Tambunan. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith .2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I. Edisi Ke Sembilan. Jakarta: Erlangga.
- Tjiptoherijanto, Soesetyo. 2008. *Ekonomi Kesehatan*. Cetakan kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Anggaran Pendidikan*.
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Vegirawati, Titin. 2012. “Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan)”. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*. Vol. 2, No. 1, Januari 2012 hal 65-74.
- Widarjono, A. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Widodo, Adi, Waridin dan Johanna Maria K. 2011. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1, No. 1, Juli 2011 hal 1-42.
- Yulianita, Anna. *_*. Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah diKabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Hal: 70-85. Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia: Universitas Sriwijaya.

Lampiran A: IPM Provinsi Jawa Timur per Kabupaten/Kota Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	IPM (%)
1.	Kota Surabaya	79,46
2.	Kota Mojokerto	79,12
3.	Kota Malang	79,07
4.	Kota Blitar	79,06
5.	Kota Madiun	78,64
6.	Kabupaten Sidoarjo	78,62
7.	Kota Kediri	78,19
8.	Kabupaten Gresik	76,75
9.	Kota Probolinggo	76,33
10.	Kota Batu	76,50
11.	Kabupaten Mojokerto	75,83
12.	Kabupaten Blitar	75,22
13.	Kota Pasuruan	75,06
14.	Kabupaten Tulungagung	75,05
15.	Kabupaten Jombang	74,97
16.	Kabupaten Trenggalek	74,73
17.	Kabupaten Magetan	74,73
18.	Kabupaten Kediri	73,73
19.	Kabupaten Pacitan	73,68
20.	Kabupaten Ponorogo	73,04
21.	Kabupaten Nganjuk	72,82
22.	Kabupaten Malang	72,65
23.	Kabupaten Lamongan	72,26
24.	Kabupaten Madiun	71,84
25.	Kabupaten Banyuwangi	71,44
26.	Kabupaten Ngawi	71,28
27.	Kabupaten Tuban	70,58
28.	Kabupaten Pasuruan	70,25
29.	Kabupaten Lumajang	69,91
30.	Kabupaten Bojonegoro	68,76
31.	Kabupaten Pamekasan	67,75
32.	Kabupaten Sumenep	67,25
33.	Kabupaten Jember	67,07
34.	Kabupaten Bangkalan	66,68
35.	Kabupaten Situbondo	66,07
36.	Kabupaten Bondowoso	65,78
37.	Kabupaten Probolinggo	65,62
38.	Kabupaten Sampang	63,04
	Rata-rata	73,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2015

Lampiran B: Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Tahun 1990 - 2014

Tahun	IPM (%)	Indeks Pendidikan (%)	Indeks Kesehatan (%)	Indeks Kemampuan Daya Beli (%)
1990	53,42	55,87	56,75	46,87
1991	53,44	56,88	56,98	47,03
1992	53,45	56,9	57,38	47,28
1993	53,48	56,94	57,46	47,45
1994	53,57	56,98	57,67	47,69
1995	53,83	57,09	57,7	47,8
1996	54,10	57,12	57,72	48,09
1997	54,36	57,2	57,77	48,36
1998	54,63	57,43	57,79	48,58
1999	54,90	58,11	57,83	48,62
2000	55,70	60,14	57,94	47,44
2001	56,50	62,2	58,05	46,26
2002	58,10	64,25	58,17	52,16
2003	59,03	64,39	58,83	50,3
2004	60,90	64,8	60,16	57,73
2005	61,72	66,03	61,21	57,9
2006	63,04	69,2	61,83	58,08
2007	63,27	69,2	62,22	58,37
2008	63,71	69,2	62,44	59,46
2009	64,33	69,71	62,75	60,52
2010	64,95	70,15	63,06	61,61
2011	65,53	70,69	63,38	62,5
2012	65,99	70,86	63,68	63,43
2013	66,60	71,44	63,98	64,8
2014	67,07	72,13	64,85	65,24
Jumlah	1475,62	1584,91	1497,6	1344,38
Rata-rata	59,02	63,4	59,9	53,77

Sumber: Data diolah oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2015

Lampiran C: Pengeluaran Permerintah di Bidang Pendidikan Kabupaten Jember
(t-1) 1990 - 2014 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Anggaran (t-1) (juta)	Realisasi (t-1) (juta)	Rasio Efektivitas (%)
1990	4183,849372	3955,297681	94,54
1991	4274,732983	3931,478808	91,97
1992	4398,756937	4002,935428	91,00
1993	3975,736290	3788,565567	95,29
1994	4693,642974	4431,675150	94,42
1995	2640,746382	2502,346400	94,76
1996	2550,756438	2503,326850	98,14
1997	2974,639740	2691,760500	90,49
1998	3136,628736	2998,402100	95,59
1999	1476,468534	1224,550416	82,94
2000	9058,897573	8903,670050	98,29
2001	5838,647327	5530,930000	94,73
2002	13984,988970	1304,480000	93,27
2003	289768,635003	265680,740804	91,69
2004	255502,190435	253340,642704	99,15
2005	26128,661779	273514,784864	104,7
2006	281630,746539	289732,428799	102,88
2007	359582,010000	430671,370712	119,77
2008	471037,105910	441095,935400	93,64
2009	509813,480332	510769,015890	100,19
2010	552401,369740	700481,956577	126,8
2011	907559,006595	877668,627839	96,7
2012	1050270,337356	1044400,425404	99,44
2013	1186384,942837	1200435,473079	101,18
2014	1256479,738297	1145275,608823	91,15

Sumber: Data diolah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pusat Provinsi Jawa Timur 2015

Lampiran D: Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Kabupaten Jember (t-1) Tahun 1990 - 2014 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Anggaran (t-1) (juta)	Realisasi (t-1) (juta)	Rasio Efektivitas (%)
1990	1136,783976	1078,669237	94,89
1991	1168,837808	1072,517889	91,76
1992	1127,786387	1090,971933	96,74
1993	1056,784900	1035,609800	97,99
1994	1387,836748	1201,696200	86,59
1995	719,287399	703,437000	97,80
1996	954,937298	949,471500	99,43
1997	913,009480	899,200700	98,49
1998	998,387267	956,112108	95,76
1999	2793,487298	2310,788000	82,72
2000	4637,362876	4985,546000	107,51
2001	9487,847363	7340,940000	77,37
2002	13798,600283	12394,720000	89,82
2003	60387,264783	56189,706168	93,05
2004	54989,328119	57385,636349	104,36
2005	57385,636349	53560,546205	93,33
2006	57344,909035	58487,134769	101,99
2007	132669,590000	112066,004834	84,47
2008	135046,817880	79854,783303	59,13
2009	142683,280362	143264,438920	100,41
2010	167924,097738	178227,8762551	106,14
2011	204949,172414	204163,6045316	99,62
2012	227944,488228	263516,1156673	115,60
2013	300304,857017	303542,531070	101,08
2014	489278,352635	434932,446269	88,89

Sumber: Data diolah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pusat Provinsi Jawa Timur 2015

Lampiran E: Data Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur Kabupaten Jember (t-1) Tahun 1990 - 2014 (dalam jutaan rupiah)

6.

Tahun	Anggaran (t-1) (juta)	Realisasi (t-1) (juta)	Rasio Efektivitas (%)
1990	4298,897309	4193,613228	97,55
1991	4389,084736	4150,055439	94,55
1992	4587,873908	4280,728805	93,30
1993	4018,872369	3888,708707	96,76
1994	5109,784098	5064,769000	99,12
1995	1593,873934	1536,588120	96,41
1996	18887,763920	17779,865550	94,13
1997	1089,839479	1040,754620	95,50
1998	15398,938794	11889,942306	77,21
1999	4108,837493	3931,765690	95,69
2000	26388,00938	24132,079000	91,45
2001	10287,9873	9290,110000	90,30
2002	37183,83929	34056,960000	91,59
2003	51837,27687	48572,163453	93,70
2004	35354,542923	32768,053959	92,68
2005	35426,918448	39564,382946	111,68
2006	53160,432369	58370,247901	109,80
2007	141908,22	135039,867343	95,16
2008	130107,393228	213501,894028	164,10
2009	210604,16019	211475,204801	100,41
2010	111871,924311	155536,11279	139,03
2011	164132,546949	186589,907592	113,68
2012	228637,234764	231703,272635	101,34
2013	266999,782555	269074,003535	100,78
2014	230784,8407	228541,080019	99,03

Sumber: Data diolah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pusat Provinsi Jawa Timur 2015

Lampiran F: Data IPM, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Tahun 1990 - 2014 di Kabupaten Jember

Tahun	IPM (%)	APBD di Bidang Pendidikan (Pd) (juta)	APBD di Bidang Kesehatan (Ks) (juta)	APBD di Bidang Infrastruktur (Inf) (Juta)
1990	53,42	3955,297681	1078,669237	4193,613228
1991	53,44	3931,478808	1072,517889	4150,055439
1992	53,45	4002,935428	1090,971933	4280,728805
1993	53,48	3788,565567	1035,609800	3888,708707
1994	53,57	4431,675150	1201,696200	5064,769000
1995	53,83	2502,346400	703,437000	1536,588120
1996	54,10	2503,326850	949,471500	17779,865550
1997	54,36	2691,760500	899,200700	1040,754620
1998	54,63	2998,402100	956,112108	11889,942306
1999	54,90	1224,550416	2310,788000	3931,765690
2000	55,70	8903,670050	4985,546000	24132,079000
2001	56,50	5530,930000	7340,940000	9290,110000
2002	58,10	13044,480000	12394,720000	34056,960000
2003	59,03	265680,740804	56189,706168	48572,163453
2004	60,90	253340,642704	57385,636349	32768,053959
2005	61,72	273514,784864	53560,546205	39564,382946
2006	63,04	289732,428799	58487,134769	58370,247901
2007	63,27	430671,370712	112066,004834	135039,867343
2008	63,71	441095,935400	79854,783303	213501,894028
2009	64,33	510769,015890	143264,438920	211475,204801
2010	64,95	700481,956577	178227,8762551	155536,11279
2011	65,53	877668,627839	204163,6045316	186589,907592
2012	65,99	1044400,425404	263516,1156673	231703,272635
2013	66,60	1200435,473079	303542,531070	269074,003535
2014	67,07	1145275,608823	434932,446269	8541,080019

Sumber: Diolah oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2015 dan Badan Pengelolaan Keuangan Pusat Provinsi Jawa Timur 2015

Lampiran G: Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glajser

```

COMPUTE RC_02=ABS_RES (RES_1) .
EXECUTE.
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT RC_02
/METHOD=ENTER X1 X2 X3.

```

One Sample Glajser Test

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.554	.271		5.745	.000		
Pd	2.863E-6	.000	1.016	2.104	.052	.160	6.250
Ks	1.070E-5	.000	1.164	2.395	.062	.158	6.328
Inf	1.022E-6	.000	.080	.297	.769	.514	1.944

a. Dependent Variable: RC_02

Lampiran H: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

```

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2 X3
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)

```

Regression**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
IPM	59.0248	5.10254	25
Pd	277803.01837268	385835.362669393	25
Ks	86273.39464148	118236.936134816	25
Inf	67574.52990288	85026.513923353	25

Correlations

		IPM	Pd	Ks	Inf
Pearson Correlation	IPM	1.000	.872	.884	.799
	Pd	.872	1.000	.913	.679
	Ks	.884	.913	1.000	.684
	Inf	.799	.679	.684	1.000
Sig. (1-tailed)	IPM	.	.000	.000	.000
	Pd	.000	.	.000	.000
	Ks	.000	.000	.	.000
	Inf	.000	.000	.000	.
N	IPM	25	25	25	25
	Pd	25	25	25	25
	Ks	25	25	25	25
	Inf	25	25	25	25

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Inf, Pd, Ks ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: IPM

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.930 ^a	.866	.846	2.00042	1.955261

a. Predictors: (Constant), Inf, Pd, Ks

b. Dependent Variable: IPM

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	540.598	3	180.199	44.908	.000 ^b
Residual	84.265	21	4.013		
Total	624.863	24			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Inf, Pd, Ks

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	55.149	.527		104.679	.000		
Pd	3.696E-6	.000	.279	2.395	.000	.160	6.250
Ks	1.718E-5	.000	.398	1.975	.000	.158	6.328
Inf	2.023E-5	.000	.337	2.018	.000	.514	1.944

a. Dependent Variable: IPM

Collinearity Diagnostics^a

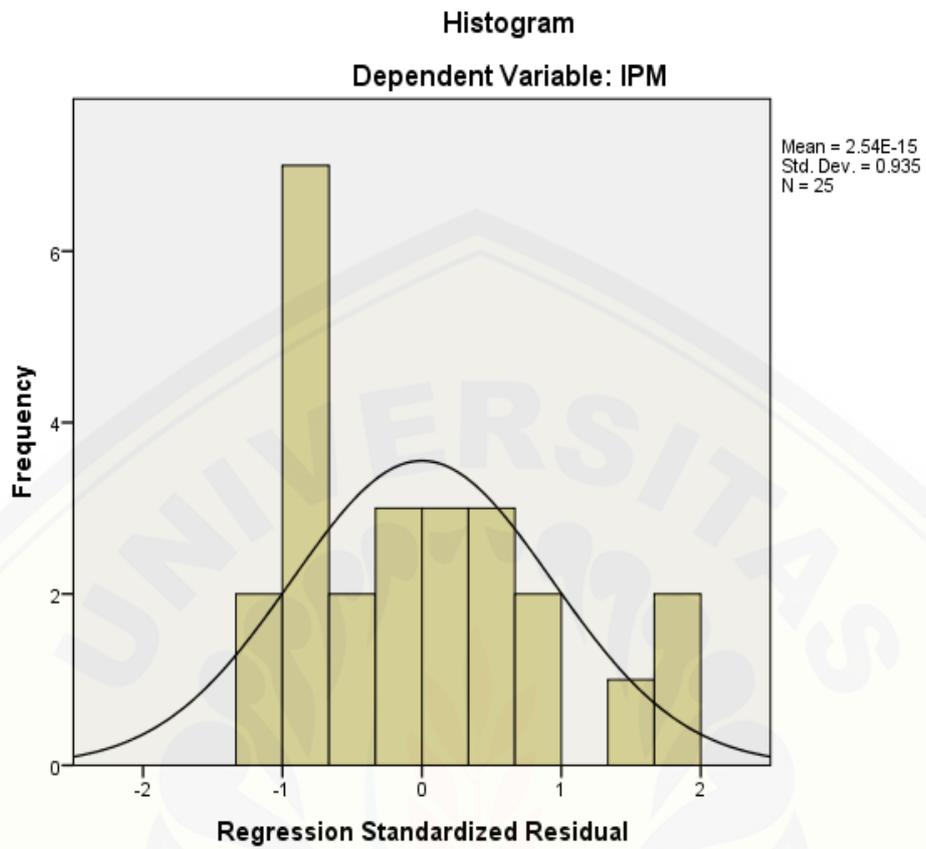
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pd	Ks	Inf
1	1	3.199	1.000	.03	.01	.01	.02
	2	.510	2.505	.89	.02	.02	.00
	3	.235	3.686	.08	.05	.05	.97
	4	.056	7.566	.00	.92	.92	.00

a. Dependent Variable: IPM

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	55.1950	69.0738	59.0248	4.74604	25
Std. Predicted Value	-.807	2.117	.000	1.000	25
Standard Error of Predicted Value	.464	1.988	.703	.393	25
Adjusted Predicted Value	55.2563	70.1176	58.9522	4.69460	25
Residual	-2.47384	3.98720	.00000	1.87378	25
Std. Residual	-1.235	1.990	.000	.935	25
Stud. Residual	-1.473	2.046	-.004	.987	25
Deleted Residual	-3.51755	4.21318	.07264	2.17887	25
Stud. Deleted Residual	-1.518	2.232	.011	1.024	25
Mahal. Distance	.327	22.685	2.880	5.281	25
Cook's Distance	.000	.525	.050	.112	25
Centered Leverage Value	.014	.945	.120	.220	25

a. Dependent Variable: IPM



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: IPM

